OMBUDSMAN RI TEMUKAN KETIDAKMERATAAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DI WILAYAH SUMATERA BARAT

Sabtu, 19 November 2022 - Marisya Fadhila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menemukan adanya ketidakmerataan distribusi pupuk di wilayah Sumatera Barat (Sumbar).

Hal ini diketahui setelah Ombudsman melakukan kunjungan kerja terkait pelayanan publik di bidang pertanian dan pangan di Sumatera Barat (Sumbar).

Ketidakmerataan tersebut, kata Yeka Hendra Fatika, terjadi di berbagai wilayah di Sumatera Barat.

Hal tersebut disampaikannya dalam Konferensi Pers Terkait Monitoring Pelayanan Publik Lingkup Pertanian dan Pangan di Provinsi Sumatera Barat di kanal Youtube Ombudsman RI pada Jumat (18/11/2022).

"Terjadinya ketidakmerataan distribusi pupuk bersubsidi di berbagai wilayah di Sumatera Barat," kata dia.

Yeka menjelaskan persoalan tersebut di antaranya terjadi pada data yang dimiliki pengecer.

Menurut Yeka, data yang dimiliki oleh pengecer adalah data kebutuhan, bukan data alokasi.

Kios Tani, kata dia, tidak memiliki data siapa saja petani yang mendapatkan pupuk bersubsidi dan jumlahnya berapa.

Begitu pula dari sisi petani, mereka juga tidak tahu akan mendapat berapa.

Mereka hanya mengetahui akan dapat pupuk bersubsidi.

Salah satu indikator petani merasa punya hak untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, menurutnya, adalah karena nama mereka sudah terdaftar di RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), Simluhtan, dan RDKK penerima pupuk bersubsidi.

"Masalahnya sederhana, pengecer tidak memiliki data bahwa siapa saja yang harus menerima pupuk bersubsidi," kata dia.

"Lantas kalau begitu, masa' tidak punya data sama sekali? Ya, pengecer memang punya data, tapi data yang ada di

pengecer itu adalah data kebutuhan, bukan data alokasi," sambung dia.

Penulis: Gita Irawan

Editor: Dewi Agustina